

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara (Moehadi et al., 2024). Peningkatan kapasitas produksi dan investasi menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Investasi berperan dalam memperluas output, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan lapangan kerja (Adianita et al., 2026). Dalam konteks negara berkembang, keterbatasan akumulasi modal domestik menjadikan *Foreign Direct Investment (FDI)* sebagai sumber pembiayaan eksternal yang penting untuk mendukung pembangunan ekonomi (Septiantoro et al., 2020). *Foreign Direct Investment* berperan dalam mendorong teknologi terbaru, transfer keterampilan, daya saing, dan akumulasi modal, khususnya di negara-negara berkembang (Aloui, 2019).

Sejalan dengan hal tersebut Manalu (2020), mengatakan bahwa aspek penting globalisasi juga terletak pada lonjakan FDI yang telah menjadi sumber utama pembiayaan eksternal bagi negara-negara di seluruh dunia. FDI dianggap penting bagi negara berkembang dan kurang berkembang. Hal ini didukung oleh penelitian Singh et al., (2012), yang menjelaskan bahwa Integrasi ekonomi Internasional memainkan peran vital dalam pembangunan ekonomi suatu negara, karena FDI adalah satu-satunya instrumen utama untuk menarik Integrasi ekonomi internasional di suatu perekonomian.

Menurut Guha & Simmonds (2020), masuknya *Foreign Direct Investment* sangat diperlukan bagi negara-negara berkembang untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka. FDI dapat meningkatkan output dan produktivitas suatu negara

sekaligus meningkatkan stok modalnya. Hal ini terjadi karena mayoritas penduduk miskin di dunia berada di negara-negara berkembang. Sebanyak 107 negara berkembang menjadi rumah bagi sekitar 1,3 miliar orang, atau 22% dari populasi global, yang hidup dalam kemiskinan multidimensional (UNHABITAT, 2022). Sebagian besar negara berkembang sering terjebak dalam lingkaran setan keterbelakangan, di mana produktivitas rendah menyebabkan pendapatan rendah, ini pada gilirannya menyebabkan tabungan rendah, tabungan rendah menyebabkan investasi rendah, Investasi yang rendah menyebabkan produktivitas yang rendah (Masoud, 2014). Oleh karena itu, untuk memutus siklus keterbelakangan dan mempertahankan kemajuan ekonomi, negara-negara berkembang membutuhkan sumber daya dari luar, seperti *Foreign Direct Investment (FDI)*. Menurut penelitian Herzer (2012), FDI dapat memutus siklus keterbelakangan dan mempercepat kemajuan ekonomi dengan meningkatkan tabungan lokal, menambah modal, dan menawarkan manajemen, pemasaran, dan teknologi yang lebih baik.

Negara berkembang dan negara terbelakang berjuang dengan kekurangan uang meskipun mereka memiliki banyak tenaga kerja dan lahan. Pemerintah dan perekonomian membutuhkan suntikan modal untuk meningkatkan lapangan kerja dan produksi. Untuk mengatasi kekurangan modal ini, negara berkembang sering mencari *Foreign Direct Investment*. Namun masalah baru muncul akibat pandemi COVID-19 yang mempengaruhi negara-negara pasar berkembang sehingga sulit bagi mereka dalam meningkatkan FDI (Khan et al., 2023).

Sejalan dengan hal tersebut Akonnor (2018), mengatakan bahwa kemampuan FDI untuk memacu pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mentransfer teknologi serta keterampilan, membuat *Foreign Direct Investment*

semakin populer dari waktu ke waktu. Statistik dari *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* menunjukkan pertumbuhan dalam arus masuk FDI global pada tahun 2023 seiring meredanya kekhawatiran resesi. Namun demikian, Secara keseluruhan, lanskap *Foreign Direct Investment (FDI)* untuk negara-negara berkembang pada tahun 2023 menunjukkan penurunan sebesar 9%, atau mencapai \$841 miliar. Negara-negara berkembang di Asia paling terdampak dengan penurunan sebesar 12%. Data lebih jelas disertakan bahwa FDI di negara-negara maju mengalami pertumbuhan sebesar 29% dari tahun 2022 (UNCTAD, 2024).

Ketimpangan distribusi FDI tersebut mendorong negara-negara berkembang untuk mencari strategi alternatif dalam meningkatkan arus FDI. Salah satu upaya yang dilakukan ialah kerjasama ekonomi antarnegara. Menurut (Wade, 2014), semakin meningkatnya kekuatan ekonomi negara-negara maju, kelompok-kelompok negara berkembang cenderung membentuk kutub baru karena tuntutan akan multilateralisme menjadi semakin nyata. Multilateralisme dapat didefinisikan secara sederhana sebagai praktik koordinasi kebijakan dalam kelompok negara melalui pengaturan atau lembaga (Larionova et al., 2018).

Salah satu bentuk kerja sama multilateral yang melibatkan negara berkembang adalah BRICS. BRICS merupakan Sebuah platform dialog dan kerja sama di antara negara-negara anggota yang secara bersama-sama mencakup 30% daratan global, 43% populasi global, dan 21% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Forum ini bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, kemakmuran, dan pembangunan di dunia multipolar, saling terhubung, dan terglobalisasi. Negara-negara BRICS mewakili Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin, yang memberikan dimensi transkontinental pada kerja sama mereka

sehingga menjadikannya sangat berharga dan signifikan dengan pertemuan formal pertama para pemimpin BRIC diadakan pada tahun 2009, yang kemudian akronimnya berubah menjadi BRICS karena ekspansi untuk pertama kalinya di tahun 2011 dengan masuknya Afrika Selatan (BRICS, 2015).

BRICS merupakan wujud ketidakpuasan yang meluas di antara negara-negara berkembang terhadap tatanan dunia yang dianggap tidak responsif terhadap kebutuhan mereka. Banyak negara lain telah menyatakan minat untuk menjadi anggota atau berafiliasi dengan BRICS, memandang blok tersebut sebagai platform alternatif untuk memperkuat kepentingan mereka dan mengakses kerja sama pembangunan di luar saluran yang didominasi Barat (Reuters, 2023). Pada tahun 2023, negara-negara anggota BRICS adalah Brasil, Federasi Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Namun, menyusul hasil KTT ke-XV negara-negara peserta di Johannesburg, diputuskan bahwa komposisi kuantitatif BRICS akan meningkat menjadi 10 anggota mulai tahun 2024, yaitu Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Iran yang kemudian di tahun 2025 keanggotaan BRICS secara resmi bertambah menjadi 11 karena bergabungnya Indonesia dalam kerjasama ini.

BRICS berkontribusi penting dalam hal perekonomian dunia, hal ini tercermin dalam pangsa BRICS pada sudut pandang PDB dunia yang meningkat dari 11,9% pada tahun 2000 menjadi 25,6% pada tahun 2021. Dengan membandingkan PDB per kapita negara-negara BRICS dengan PDB per kapita dunia dan negara-negara berpenghasilan menengah, ditemukan bahwa PDB per kapita BRICS telah meningkat relatif terhadap PDB per kapita dunia (Agarwal & Kumar, 2023). Hal yang serupa juga terjadi pada tingkat FDI mereka dalam hal ini

Cina, Brazil, dan India menjadi 3 negara berkembang dengan penerimaan FDI terbesar antara tahun 2012 dan 2023 (*World Bank, 2025*).

Investasi asing telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi BRICS sejak tahun 2001, dengan arus masuk FDI tahunan meningkat lebih dari empat kali lipat dari tahun 2001-2021 dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan modal tetap bruto. Pertumbuhan arus masuk FDI ke BRICS sangat kuat pada dekade pertama, tetapi relatif stagnan sejak tahun 2011, di tengah latar belakang global pertumbuhan negatif arus FDI selama dekade tersebut. Meskipun secara umum arus masuk FDI pada negara-negara BRICS menunjukkan peningkatan, pada kenyataannya distribusi FDI tersebut tidak merata di setiap negara. Beberapa negara mampu mempertahankan bahkan meningkatkan FDI mereka, sementara negara lainnya justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Fenomena tersebut juga terlihat pada enam negara hasil ekspansi BRICS, Meskipun mereka dipilih karena memiliki potensi ekonomi dan posisi yang strategis dalam ekonomi dunia, keenam negara menunjukkan arus masuk FDI yang beragam. Berikut disajikan Tabel 1.1 Arus masuk FDI ke BRICS, 2014-2024 dalam miliar dolar.

Tabel 1. 1 *FDI inflows BRICS 2014-2024 (miliar USD)*

Negara	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brazil	64	50	54	67	60	65	28	51	73	64	59
Rusia	29	12	37	26	13	32	10	39	-15	9	3
India	35	44	44	40	42	51	64	45	49	28	28
China	129	136	134	136	138	141	149	181	189	163	116
Afrika Selatan	6	2	2	2	5	5	3	40	9	3	2
Mesir	5	7	8	7	8	9	6	5	11	10	47
Ethiopia	2	3	4	4	3	3	2	4	4	3	4
Indonesia	22	17	4	21	21	24	19	21	25	21	24
Iran	2	2	3	5	2	2	1	1	2	1	1

Sumber: UNCTAD (data diolah) 2026

Tabel 1.1 *FDI inflows BRICS 2014-2024 dalam miliar dolar (lanjutan)*

Negara	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Uni Emirat Arab	11	9	10	10	10	18	20	21	23	31	46
Arab Saudi	2	4	22	1	12	3	2	28	27	23	16
BRICS	307	286	322	319	314	353	304	436	397	356	346

Sumber: UNCTAD (data diolah) 2026

Berdasarkan tabel 1.1 negara pasca ekspansi BRICS pada KTT ke-XV termasuk dalam angka 2014 meskipun bergabung dengan BRICS pada tahun 2024. Berdasarkan data yang tercatat dalam data FDI UNCTAD tahun 2014 sampai 2023, BRICS memiliki rata-rata FDI Masuk sebesar \$339 miliar dalam satu dekade terakhir. UNCTAD mencatat jumlah FDI yang masuk di BRICS cenderung meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa BRICS sebagai sebuah kelompok, telah mengalami peningkatan dalam dekade terakhir, dari \$307 miliar pada tahun 2014 menjadi \$356 miliar pada tahun 2023. Perbedaan angka penerimaan FDI antara negara utama BRICS dengan negara hasil ekspansi sangat terlihat dengan jelas. Pada periode di atas hampir 75% total FDI BRICS dihasilkan oleh 5 negara utama seperti Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Sedangkan negara hasil ekspansi yang berkontribusi tinggi terhadap FDI BRICS adalah Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Indonesia. Pada tahun 2023 Mesir berkontribusi sebesar \$10 miliar atau 1,7%, Ethiopia menerima \$4 miliar dengan kontribusi 1,1%, Indonesia menyumbang \$21 miliar atau setara dengan 5,9%, Iran dengan hanya \$6 miliar atau 1,7% dari total FDI BRICS, sedangkan Uni Emirat Arab menjadi negara hasil ekspansi yang menyumbang FDI tertinggi senilai \$31 miliar atau 8,7%, nilai yang hampir sama diperoleh oleh Arab Saudi yaitu \$23 setara dengan nilai kontribusi sebesar 6,5%. Secara garis besar 6 negara hasil

ekspansi mengalami ketimpangan ketika dibandingkan dengan 5 negara utama BRICS. Selain itu kondisi dari penerimaan arus masuk FDI yang berfluktuasi ditambah dengan penurunan tajam di tahun 2023 yang dialami oleh hampir seluruh negara hasil ekspansi kecuali Uni Emirat Arab, mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor tertentu yang menjadi latar belakang ketimpangan dan penurunan yang dialami oleh 6 negara hasil ekspansi BRICS tersebut.

World Bank (2025), Mencatat bahwa negara dengan kerangka kelembagaan atau kualitas institusi yang kuat akan menerima jauh lebih banyak FDI daripada negara dengan kualitas institusi yang lemah, hal tersebut terbukti dari menurunnya penerimaan FDI di negara-negara berkembang pada tahun 2023 yang turun ke level terendahnya dihitung dari tahun 2005.

Kualitas institusi tersebut dalam Kaufmann (2010), yang mendefinisikan kualitas institusi sama dengan tata kelola menjelaskan bahwa kualitas institusi dapat diukur diantaranya melalui *voice and accountability* serta *Control of Corruption*. *Voice and Accountability* diartikan sebagai sejauh mana warga negara suatu negara didengarkan untuk mampu berpartisipasi dalam memilih pemerintah mereka, serta kebebasan berekspresi, kebebasan asosiasi, dan media yang bebas. Hakikatnya pengertian tersebut sama dengan prinsip dari demokrasi. Sedangkan *Control of Corruption* menangkap persepsi tentang sejauh mana kekuasaan publik dijalankan untuk keuntungan pribadi, termasuk bentuk korupsi kecil maupun besar, serta 'penguasaan' negara oleh kaum elit dan kepentingan pribadi.

Sejalan dengan hal tersebut Caiden (2016), menjelaskan bahwa korupsi merupakan faktor yang secara langsung merusak good governance karena melemahkan efektivitas pemerintahan dan legitimasi politik, sementara demokrasi

menyediakan mekanisme institusional seperti rule of law, perlindungan hak sipil, dan lembaga pengawasan independen yang berfungsi membatasi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi dan korupsi dapat dipandang sebagai dimensi penting dalam merefleksikan kualitas institusi suatu negara. Selain itu, Khan et al., (2023) yang menyoroti peran penting kualitas kelembagaan dan tata kelola yang baik dalam menarik FDI, menjadikan demokrasi dan pengendalian korupsi negara muncul sebagai indikator penting kualitas kelembagaan.

Menurut Acemoglu & Robinson (2012), kualitas institusi suatu negara dapat dilihat dari karakteristik institusinya, yaitu inklusif atau ekstraktif. Institusi inklusif ditandai oleh perlindungan hak milik, supremasi hukum, keterbukaan akses ekonomi, serta partisipasi politik yang luas, yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Sebaliknya, institusi ekstraktif cenderung memusatkan kekuasaan pada elite dan membatasi akses ekonomi maupun politik. Semakin inklusif suatu institusi, maka semakin tinggi kualitas institusi tersebut dan semakin besar kemampuannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dibandingkan institusi yang bersifat ekstraktif.

Demokrasi dapat dilihat sebagai serangkaian praktik dan prinsip yang melembagakan dan dengan demikian pada akhirnya melindungi kebebasan. Meskipun definisi yang tepat masih sulit diperoleh, sebagian besar pengamat saat ini akan setuju bahwa, paling tidak, ciri-ciri mendasar dari demokrasi mencakup pemerintahan berdasarkan kekuasaan mayoritas dan persetujuan dari yang diperintah, adanya pemilihan umum yang bebas dan adil, perlindungan terhadap kelompok minoritas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi mensyaratkan persamaan di depan hukum, proses hukum dan pluralisme politik

Beberapa pihak berpendapat bahwa demokrasi merupakan sebuah konsep dikotomis bahwa sebuah negara bisa demokratis atau tidak (Kekic, 2007).

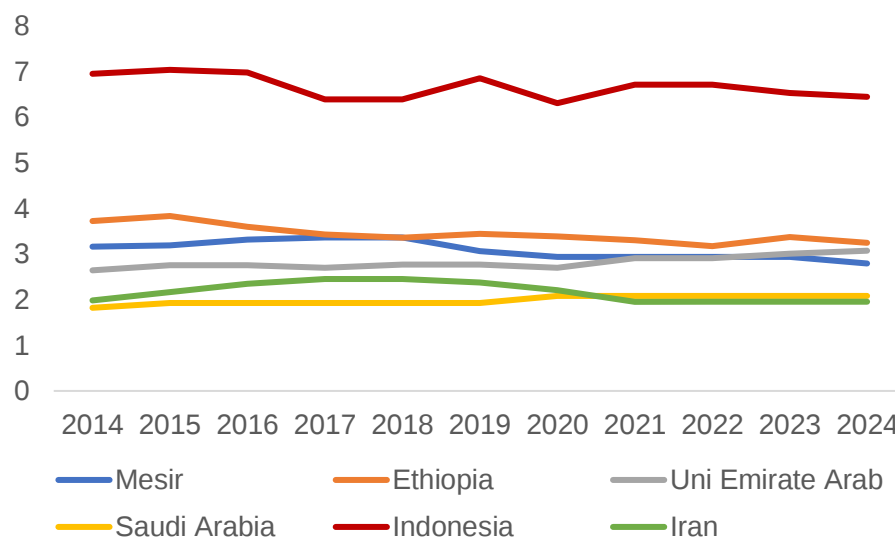
Demokrasi kini berkembang di banyak negara di seluruh dunia. Perannya sebagai komponen penting dari sistem politik barat kini telah diakui sebagai manfaat bagi komunitas internasional. Selain bersifat inheren dalam pengertian geografis yang tunggal dan terkonsentrasi, demokrasi telah meresap ke setiap wilayah sebagai gerakan dan sistem politik regional yang berasal dari status demokrasi negara tersebut. Demokrasi kini telah memengaruhi beberapa aspek politik masyarakat, tergantung pada kondisi, kebiasaan, dan budaya yang mendukungnya (Rahmatulloh, 2019). Penelitian milik Olson (1993), menyatakan bahwa demokrasi yang mapan, melalui pembatasan eksekutif dan independensi peradilan, menjamin hak milik, yang menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan menarik bagi investor asing untuk berinvestasi. Menurut Olson, demokrasi lebih menarik bagi *Foreign Direct Investment* daripada otokrasi. Dalam Maxwell (2022) dikatakan bahwa korelasi antara FDI dan demokrasi terbangun melalui kerangka dari demokrasi itu sendiri. Dalam demokrasi, populasi umum yang memenuhi syarat untuk memilih baik secara langsung maupun tidak langsung menentukan kebijakan dan peraturan di bidang politik dan ekonomi, yang pada gilirannya berdampak pada jumlah arus masuk FDI. Oleh karena itu, adanya korelasi secara teoritis membuat negara-negara berupaya melakukan penyesuaian antara peringkat demokrasi dan arus masuk FDI. Pemerintah bersekutu dengan negara-negara demokrasi lainnya jika mereka ingin mendapatkan keuntungan dari peningkatan arus masuk FDI. Namun, terdapat berbagai faktor lain yang perlu dipertimbangkan mengapa suatu negara memilih untuk bersikap demokratis atau tidak, dalam penurunan arus masuk FDI.

Namun, temuan empiris mengenai hubungan demokrasi dan FDI masih inkonsisten. Mathur & Singh (2007), menyatakan bahwa meskipun negara-negara demokratis memastikan penyediaan hak-hak politik dan sipil bagi warga negara, hal ini bukanlah jaminan otomatis bagi kebebasan ekonomi. Bahkan, korelasi antara indeks demokrasi dan indeks kebebasan ekonomi ini sangat rendah. Oleh karena itu, negara-negara yang lebih demokratis mungkin menerima lebih sedikit aliran FDI jika kebebasan ekonomi tidak dijamin. Negara-negara berkembang yang sedang melakukan demokratisasi seringkali tidak mampu mendorong reformasi ekonomi yang diinginkan investor karena adanya kepentingan politik yang saling bersaing.

BRICS merupakan kerjasama yang beranggotakan negara dari berbagai macam benua di seuruh dunia. Sehingga negara-negara anggota BRICS memiliki karakteristik termasuk sistem pemerintahan yang beragam. Beberapa negara hasil ekspansi seperti Indonesia, Ethiopia, dan Mesir menjalankan sistem demokrasi meskipun dianggap belum stabil. Sedangkan Iran tidak menerapkan sistem demokrasi secara utuh karena masih adanya sistem otoriter. Berbeda juga dengan Uni Emirat Arab dan Arab Saudi yang tidak melaksanakan pemilu nasional sehingga dapat dikatakan bahwa demokrasi tidak dijalankan pada negara ini. Tingkat demokrasi suatu negara dapat diidentifikasi melalui *democracy index* pada masing masing negara yang diproduksi oleh *Economist Intelligence Unit*. Menurut *Economist Intelligence Unit*, telah terjadi tren berupa kemunduran dan stagnasi dalam beberapa tahun terakhir pada wilayah global, dan menandai titik terendah sejak indeks demokrasi dimulai pada tahun 2006. Kemerosotan kondisi demokrasi didorong oleh perkembangan negatif di negara-negara non-demokrasi, termasuk peningkatan konflik kekerasan dan penindakan otoriter. Sebagian besar

kemunduran terjadi di antara negara-negara non-demokrasi yang diklasifikasikan sebagai rezim hibrida dan rezim otoriter. Penurunan serupa juga telah terjadi pada negara-negara hasil ekspansi BRICS. Berikut disajikan gambar 1.1 skor indeks demokrasi 6 negara BRICS 2014-2024.

Gambar 1.1 Indeks demokrasi 6 negara BRICS 2014-2024 (skala 1-10)



Sumber: World Bank(data diolah) 2026

Berdasarkan gambar 1.1 skor indeks demokrasi di atas pada 6 negara anggota BRICS dari tahun 2014-2024. Dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki nilai demokrasi paling tinggi jika dibandingkan dengan 5 negara lainnya, dari tahun 2014-2024 Indonesia berada pada skor rata-rata 6,66 dengan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2020 dengan selisih 0,18 dari tahun 2019. Negara dengan indeks demokrasi tertinggi kedua adalah Etihiopia dengan rata-rata indeks demokrasi 3,43 nilai ini memiliki perbedaan yang cukup jauh ketika dibandingkan dengan indeks demokrasi milik Indonesia. Tidak jauh berbeda dengan nilai indeks demokrasi Ethiopia, Mesir memperoleh skor rata-rata 3,08 yang disebabkan karena sistem yang dianut oleh Mesir tidak sepenuhnya menyerahkan pemerintahan kepada rakyat. Lebih rendah dari skor milik Mesir, Uni

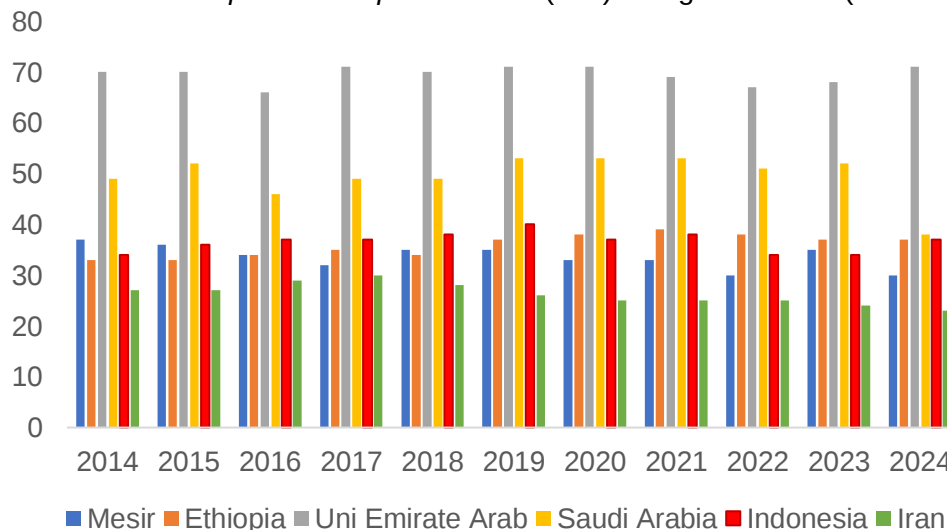
Emirat Arab menjadi negara dengan indeks demokrasi rendah yang hanya menyentuh angka 2,81 dari tahun 2014-2024 hal tersebut terjadi salah satunya karena Uni Emirat Arab tidak menyelenggarakan pemilu secara nasional untuk memilih pemimpin pemerintahan. Iran memiliki nilai demokrasi 2,16, negara ini memiliki presiden yang dipilih langsung oleh rakyat namun otoritas tertinggi pada negara Iran dipilih oleh majelis ahli bukan rakyat. Sangat berbeda dengan nilai indeks demokrasi Indonesia, menurut data yang dimuat *World Bank* Arab Saudi hanya memiliki indeks demokrasi sebesar 1,98. Arab Saudi merupakan negara dengan kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja dengan sistem pemilihan yang sudah ditetapkan sesuai peraturan tanpa adanya suara rakyat. Secara agregat 6 negara BRICS di atas memiliki indeks demokrasi yang sangat beragam karena sistem yang mereka anut juga bervariasi. Tetapi, 6 negara tersebut memiliki kesamaan dalam berfluktuasi terutama pada tahun 2020 yang menjadi tahun dengan penurunan indeks demokrasi secara serempak karena adanya COVID-19, Mesir, Ethiopia, Uni Emirat Arab, Iran, dan Indonesia masing masing mengalami penurunan sedangkan Arab Saudi justru mengalami peningkatan.

Pada sisi lain, para ekonom dan organisasi internasional secara umum mengakui bahwa korupsi menjadi salah satu tantangan utama bagi masyarakat modern kita. Korupsi menghambat pertumbuhan dan kemakmuran dengan mendistorsi aktivitas bisnis, mengurangi investasi, dan melemahkan efek yang diharapkan dari kebijakan, dan menghambat fungsi lembaga (Sequeira, 2015). Dalam Hasan et al., (2018), Korupsi dianggap bukan hanya sebagai tindakan yang salah secara moral, tetapi juga sebagai indikator ketidaksetaraan ekonomi dan faktor negatif dari sudut pandang tata kelola. Korupsi digunakan sebagai isu politik tingkat tinggi untuk memobilisasi pemilih dan untuk mengubah rezim yang

berkuasa di suatu negara. Korupsi dapat berdampak baik maupun buruk bagi perusahaan multinasional, tergantung pada waktu dan tujuan, serta faktor lainnya.

Menurut penelitian Zangina & Hassan (2020), korupsi sebagai faktor kelembagaan semakin menarik perhatian akademisi karena mampu untuk membentuk *'the rules of the game'* yang berfungsi sebagai insentif investasi atau menghalangi investor asing. Korupsi adalah ciri khas suatu negara yang secara langsung berkaitan dengan keunggulan lokasi yang memengaruhi investasi asing. Dalam konteks 6 negara hasil ekspansi BRICS, korupsi juga memiliki variasi yang tinggi ketika membandingkan negara satu dengan yang lainnya. Namun, indikator penilaian korupsi yang dilakukan oleh *Transparency International* mencatat bahwa 6 negara tersebut secara serempak mengalami penurunan yang cukup tajam dari tahun 2014 hingga tahun 2024 berikut disajikan gambar 1.2 mengenai *Corruption Perceptions Index (CPI)* 6 negara BRICS tahun 2014-2024.

Gambar 1.2 *Corruption Perceptions Index (CPI)* 6 negara BRICS (skala 1-100)



Sumber: *Transparency International* (data diolah) 2026

Pada gambar 1.2 mengenai *Corruption Perceptions Index (CPI)* yang merupakan indeks dalam mengukur tingkat persepsi korupsi di 6 negara BRICS dari tahun 2014 hingga 2024. Selama rentang waktu sepuluh tahun di atas, BRICS

sebagai sebuah kelompok berkembang senantiasa menunjukkan angka yang stagnan atau cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan pada 3 tahun terakhir terjadi akibat dari perdamaian global yang semakin memburuk. Menurut *Transparency International* dalam hal ini korupsi bisa menjadi penyebab sekaligus akibat. Korupsi dapat melemahkan pemerintah dalam melindungi rakyat dan mengurangi kepercayaan publik. Di sisi lain, konflik menciptakan peluang bagi korupsi. Sementara itu pada gambar 1.2 dapat diketahui negara ekspansi BRICS yang memiliki CPI terendah ialah Iran dengan nilai rata-rata 26. Disusul oleh Mesir dengan selisih 7 nilai di atas Iran yaitu 34. Sedangkan Ethiopia meskipun memperoleh FDI lebih sedikit dari Mesir CPI negara ini adalah 36. Indonesia dengan rata-rata CPI 37 tidak jauh berbeda dengan nilai CPI Ethiopia. Di sisi lain Arab Saudi memiliki tingkat korupsi yang jauh lebih rendah dengan skor CPI 50. Sedangkan negara dengan skor CPI tertinggi dalam negara ekspansi BRICS ialah Uni Emirat Arab sebesar 69. Meskipun demikian, negara ini juga mengalami penurunan yang hampir sama dengan negara-negara dihitung dari tahun 2019. Semakin tinggi nilai CPI maka dapat diindikasikan bahwa negara tersebut memiliki tingkat korupsi yang rendah.

Selain faktor institusional domestik, investor juga mempertimbangkan risiko yang bersifat politik dan keamanan, yang tercermin dalam risiko geopolitik masing-masing negara. Menurut Laporan Tren Investasi Global terbaru dari *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, Ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi tetap menjadi risiko utama bagi negara maju dan negara berkembang dalam menghadapi lanskap investasi yang terus berubah (UNCTAD, 2025). Secara teoritis, ketegangan geopolitik dapat dihubungkan dengan teori risiko negara (*country risk theory*), dengan investor menilai stabilitas suatu negara

dari segi politik, hukum, dan keamanan untuk mengambil keputusan alokasi modal (Bekaert et al., 2015). Universitas Bocconi melalui ketiga stabilitas aspek tersebut akhirnya membuat *geopolitical risk index* untuk menilai risiko geopolitik suatu negara, yang semakin penting di tengah munculnya ketegangan geopolitik dan lanskap ekonomi yang terus berkembang.

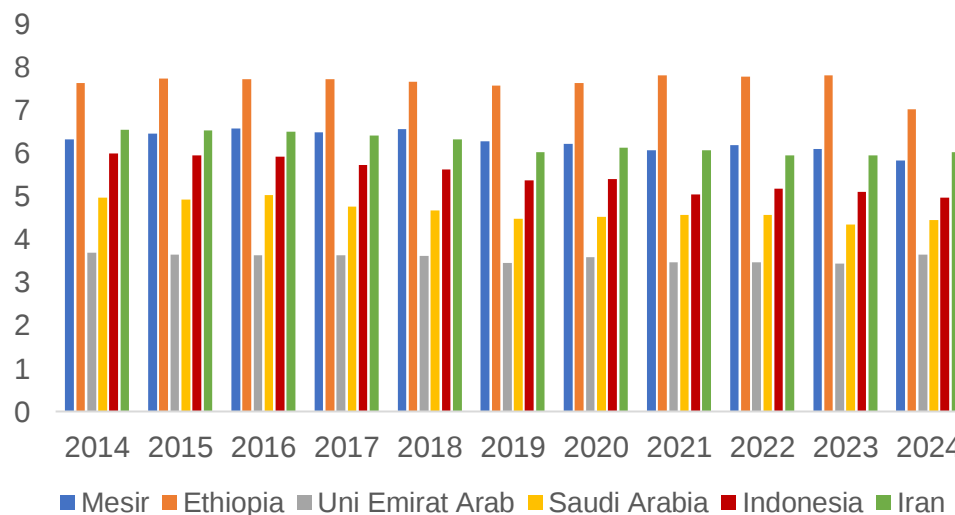
Pada dunia global saat ini, setiap gangguan yang terjadi di suatu wilayah tertentu dapat menimbulkan gelombang kejut di seluruh negara. Gangguan ini dapat memengaruhi investasi asing dan operasi sehari-hari perusahaan multinasional (Wang, 2023). Geopolitik tidak hanya bersifat regional, melainkan berdampak pada sistem ekonomi global, termasuk perubahan struktur rantai pasok dan arah investasi multinasional. Misalnya, ketegangan Amerika Serikat dengan Cina telah mendorong relokasi produksi dari Asia Timur ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Antràs, 2020).

Perusahaan multinasional cenderung memilih lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi untuk merumuskan strategi investasi jangka panjang, mereka membangun rantai pasokan yang efisien dan melindungi tenaga kerja mereka (Yilmaz, 2024). Kondisi politik, komersial, atau ekonomi internasional sangat memengaruhi sentimen dan perilaku investor. Meskipun prediksi keuntungannya baik, perusahaan mungkin menunda keputusan dan menunjukkan insentif yang berkurang untuk memasuki pasar baru karena pergeseran lingkungan risiko dan persepsi iklim investasi, bahkan jika risiko tersebut tidak terwujud (Antonakakis et al., 2017). Perusahaan multinasional harus merevisi persepsi mereka tentang kemungkinan terjadinya konflik geopolitik (risiko geopolitik) dan dampak dari lanskap geopolitik yang terus berubah (ketidakpastian geopolitik) terhadap operasi

global mereka agar dapat membuat keputusan investasi yang tepat dan jangka panjang (Bussy & Zheng, 2023).

Secara global risiko geopolitik selalu berfluktuasi dan tidak dapat diprediksi secara tepat, namun secara personal indeks risiko geopolitik dapat menilai terkait risiko geopolitik setiap negara di dunia dengan memperhitungkan lewat risiko politik, intervensi pemerintah, globalisasi, konflik dan kerusakan, kerentanan geografis, dan ketergantungan geoekonomi. BRICS sebagai sebuah wadah kerja sama yang menaungi berbagai negara di seluruh negara pastinya memiliki variasi baik dari letak geografis bahkan konflik dan kerusakan karena kerjassama BRICS tidak berdasarkan pada satu kawasan yang sama sehingga risiko geopolitik dari 6 negara hasil ekspansi BRICS juga memiliki tingkatan yang beragam. Berikut disajikan gambar 1.3 terkait *Geopolitical Risk Index* BRICS tahun 2014-2024.

Gambar 1.3 *Geopolitical Risk Index* (GPR) BRICS tahun 2014-2024 (skala 1-10)



Sumber: *Geopolitical Risk Index* (data diolah) 2026

Pada gambar 1.3 digambarkan mengenai indeks risiko geopolitik dari masing-masing negara ekspansi BRICS tahun 2014-2024. Dari gambar tersebut terlihat bahwa negara dengan risiko geopolitik tertinggi adalah Ethiopia dengan

rata-rata indeks 7,6. Tingginya tingkat risiko geopolitik pada Ethiopia sebagian besar merupakan pengaruh dari penilaian *conflict dan unrest index*. Adanya konflik internal dan ketegangan etnis serta letak negara yang merupakan kawasan rawan konflik membuat Ethiopia menjadi negara dengan risiko geopolitik tertinggi pada BRICS. Sedangkan risiko geopolitik terendah dimiliki oleh Uni Emirat Arab dengan rata-rata indeks sebesar 3,6. Uni Emirat Arab tergolong pada negara yang minim terjadi konflik dan kerusuhan. Salah satu alasan dari hal tersebut ialah tingginya pendapatan perkapita di sana. Menurut *World Bank* tingginya kesejahteraan ekonomi suatu negara dapat mengurangi potensi konflik sosial. Mesir, Iran, dan Indonesia dengan rata-rata indeks risiko geopolitik masing-masing 6,3; 6,2; dan 5,5 membuat ketiga negara ini dikategorikan sebagai negara dengan risiko ketegangan geopolitik yang tinggi meskipun tidak seberes Ethiopia. Sedangkan Arab Saudi tergolong negara dengan risiko geopolitik sedang. Secara agregat risiko geopolitik pada 6 negara ekspansi BRICS berjalan secara stagnan. Di tahun 2020 6 negara tersebut secara serempak mengalami peningkatan risiko akibat COVID-19. Namun angka tersebut berangsur turun hingga tahun 2023, meskipun penurunan terjadi dengan angka relatif kecil. Perkembangan indeks risiko geopolitik pada negara-negara BRICS, memperlihatkan tingkat risiko yang cenderung mengalami penurunan dari waktu ke waktu dan menunjukkan perbedaan yang cukup jelas antarnegara. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko geopolitik sangat dipengaruhi oleh kondisi global maupun domestik dari masing-masing negara. Perbedaan tingkat risiko tersebut juga memberikan gambaran bahwa keputusan investor dalam menanamkan modal tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya risiko, tetapi juga oleh bagaimana suatu negara mampu mengelola risiko tersebut.

Dalam beberapa penelitian sebelumnya, risiko geopolitik pada umumnya ditemukan memiliki pengaruh negatif terhadap arus FDI. Seperti halnya dengan penelitian milik Bussy & Zheng (2023), menunjukkan bahwa peningkatan risiko geopolitik dapat menurunkan arus investasi asing secara signifikan, terutama pada negara-negara *emerging markets*. Hal ini terjadi karena investor cenderung menghindari negara dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi, baik dari sisi politik, keamanan, dan ekonomi. Namun, penelitian tersebut juga menekankan bahwa dampak negatif tersebut tidak selalu bersifat mutlak. Kualitas tata kelola pemerintahan (*governance*) memiliki peran penting dalam meredam pengaruh risiko geopolitik terhadap FDI. Negara dengan institusi yang kuat, transparansi yang baik, dan sistem hukum yang jelas cenderung lebih mampu mempertahankan kepercayaan investor meskipun berada dalam kondisi geopolitik yang tidak stabil. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Yilmaz (2024), yang menunjukkan bahwa risiko geopolitik tidak hanya berdampak dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang. Artinya, peningkatan risiko geopolitik dapat memberikan efek berkelanjutan terhadap penurunan arus investasi asing, sehingga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam analisis FDI.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Acheampong (2025), menemukan bahwa demokrasi memiliki pengaruh positif terhadap arus FDI, terutama pada negara dengan tingkat human capital yang tinggi. Hal ini disebabkan karena sistem demokrasi cenderung menciptakan lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan stabil, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor asing. Dalam kondisi tersebut, investor merasa lebih aman karena adanya perlindungan hukum dan kepastian kebijakan. Namun demikian, hubungan ini tidak selalu berlaku di semua negara. Pada negara dengan tingkat

human capital yang rendah, demokrasi justru dapat menurunkan arus FDI karena ketidakmampuan dalam mengelola kebijakan ekonomi secara efektif dan efisien. Berbeda dengan penelitian Ahmed (2023), yang justru menunjukkan bahwa demokrasi bukan merupakan faktor utama dalam menarik FDI, terutama ketika faktor lain seperti budaya politik, kondisi sosial, dan struktur ekonomi lebih dominan dalam memengaruhi keputusan investor. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh demokrasi terhadap FDI sangat bergantung pada kondisi masing-masing negara dan tidak dapat digeneralisasi secara langsung.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mance & Trbojevi (2026), ditemukan bahwa semakin rendah tingkat korupsi suatu negara, maka semakin tinggi arus FDI yang masuk. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat korupsi dapat meningkatkan kepastian hukum, mengurangi biaya tambahan yang tidak resmi, serta menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif bagi investor asing. Dengan kata lain, investor cenderung lebih tertarik untuk berinvestasi di negara yang memiliki tingkat transparansi yang tinggi dan praktik tata kelola yang baik. Namun, di sisi lain, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa korupsi tidak selalu berdampak negatif terhadap FDI. Penelitian milik Gossel (2018), menemukan bahwa korupsi awalnya dapat berperan sebagai alat untuk memfasilitasi masuknya FDI ketika institusi demokrasi masih lemah yang bisa disebut '*helping hand*', tetapi seiring dengan bertambahnya modal demokratis dan penguatan institusi, korupsi beralih menjadi hambatan atau '*grabbing hand*' bagi investasi asing. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara korupsi dan FDI tidak selalu sama, melainkan dapat berubah tergantung pada tingkat perkembangan institusi suatu negara.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah adanya perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya mengenai pengaruh kualitas institusi terhadap arus masuk *Foreign Direct Investment*. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa demokrasi dan korupsi berpengaruh positif terhadap FDI, sementara penelitian lainnya menemukan hasil yang tidak signifikan atau berbeda arah. Di sisi lain, risiko geopolitik juga telah banyak digunakan sebagai indikator dalam menjelaskan dinamika investasi internasional, namun hasil penelitian menunjukkan variasi pengaruh antarnegara dan periode waktu. Sementara itu lembaga resmi internasional seperti *World Bank* dan UNCTAD memperkirakan bahwa kekuatan lembaga dan kondisi geopolitik menjadi salah satu penyebab turunnya arus masuk FDI ke suatu negara.

Keterbaruan penelitian ini berangkat dari terbatasnya literatur yang secara khusus mengkaji pengaruh Demokrasi, Korupsi dan Risiko Geopolitik terhadap arus FDI pada negara-negara pasca ekspansi BRICS 2024. Padahal, negara-negara tersebut memiliki karakteristik institusional dan tingkat risiko geopolitik yang berbeda. Sehingga untuk mengetahui fenomena ini, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Wilayah observasi yang dilakukan yaitu 6 negara pasca ekspansi BRICS pada KTT ke-XV yaitu, Mesir, Ethiopia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Indonesia, dan Iran periode 2014-2024.

Data yang disajikan pada latar belakang mencakup seluruh negara anggota BRICS namun data tersebut hanya untuk memberikan gambaran umum, analisis dalam penelitian ini tetap difokuskan pada enam negara hasil ekspansi BRICS, yaitu Mesir, Ethiopia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Indonesia, dan Iran. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara-negara hasil ekspansi tersebut justru memiliki variasi yang signifikan, karena beberapa di antaranya menempati posisi tertinggi maupun

terendah dalam memperoleh arus masuk FDI, nilai demokrasi, CPI, dan risiko geopolitik. Dengan demikian, perlu adanya penelitian lebih lanjut, dengan fokus utama penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis dari beberapa faktor terhadap arus FDI sehingga memberikan gambaran yang luas dan akurat mengenai permasalahan FDI di 6 negara hasil ekspansi BRICS. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan wawasan terkait faktor mana yang berpengaruh terhadap arus masuk *Foreign Direct Investment (FDI)*. Dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dan membuat penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kualitas Institusi dan Ketegangan Geopolitik terhadap Foreign Direct Investment di 6 Negara Ekspansi BRICS tahun 2014-2024”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Demokrasi berpengaruh terhadap *Foreign Direct Investment* di 6 Negara BRICS Tahun 2014-2024?
2. Apakah Korupsi berpengaruh terhadap *Foreign Direct Investment* di 6 Negara BRICS Tahun 2014-2024?
3. Apakah Risiko Geopolitik berpengaruh terhadap *Foreign Direct Investment* di 6 Negara BRICS Tahun 2014-2024?
4. Apakah Demokrasi, Korupsi, dan Risiko Geopolitik berpengaruh secara simultan terhadap *Foreign Direct Investment* di 6 Negara BRICS Tahun 2014-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Demokrasi terhadap *Foreign Direct Investment* di 6 Negara BRICS Tahun 2014-2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Korupsi terhadap *Foreign Direct Investment* di 6 Negara BRICS Tahun 2014-2024.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Risiko Geopolitik terhadap *Foreign Direct Investment* di 6 Negara BRICS Tahun 2014-2024.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh simultan Demokrasi, Korupsi, dan Risiko Geopolitik terhadap *Foreign Direct Investment* di 6 Negara BRICS Tahun 2014-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan di atas dan dari beberapa perumusan masalah serta tujuan yang dijabarkan, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian, dan menambah wawasan dalam rumpun ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Serta sebagai penambah wawasan mengenai Demokrasi, Korupsi, dan Risiko Geopolitik terhadap *Foreign Direct Investment (FDI)*.

2. Manfaat praktis

- 1) Diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu penunjang ataupun bahan evaluasi dalam membuat kebijakan dengan melihat analisis pengaruh kualitas institusi dan ketegangan geopolitik terhadap *Foreign Direct Investment*.

- 2) Diharapkan akan meningkatkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai pengaruh kualitas institusi dan ketegangan geopolitik terhadap *Foreign Direct Investment*.
- 3) Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pembaca dan berfungsi sebagai referensi untuk penelitian dan wacana akademik di masa mendatang, dan sebagai bahan bacaan kepada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Program studi Ekonomi Pembangunan.

1.5 Batasan Penelitian

Terdapat beberapa batasan dalam penelitian ini yaitu, penelitian dibatasi pada faktor dan lokasinya agar menghasilkan studi yang lebih terkonsentrasi dan unggul. Dengan data yang dikumpulkan dari tahun 2014 hingga 2023, studi ini berfokus pada *Foreign Direct Investment (FDI)*, yang dibuktikan dengan volume arus masuk FDI sebagai variabel dependen, dan faktor independen berupa Demokrasi, korupsi, dan Risiko Geopolitik. Mempelajari bagaimana faktor independen memengaruhi variabel dependen adalah tujuan utama studi ini. *World Bank*, *Transparency International*, dan *Geopolitical Risk Index* adalah sumber data yang digunakan. Studi ini menggunakan metodologi kuantitatif deskriptif. Mesir, Ethiopia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Indonesia, dan Iran adalah enam negara yang membentuk perluasan BRICS setelah KTT ke-XV. Ketersediaan data menjadi dasar pembatasan ini. Dari sudut pandang metodologis, pembatasan ini bertujuan untuk menjaga keandalan dan validitas temuan studi, mencegah bias yang disebabkan oleh data yang tidak konsisten, dan menjamin stabilitas model ekonometrik yang digunakan dalam analisis.